

Keterlibatan Desa Sumbermulyo dalam Kerjasama Sister Province antara D.I Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do

Sannya Pestari Dewi¹, Rivelda Pricilia Heatbun², Rezki Nur Fajri³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas AMIKOM Yogyakarta
 Jl. Ringroad Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta

e-mail: *¹ sannya.pestari.dewi@amikom.ac.id, ² riveldapricilia@gmail.com,
³ rezkinurfajrimunahar@gmail.com

Abstract

D.I. Yogyakarta has cooperated with Gyeongsangbuk-Do Province for quite a long time. This collaboration has involved various actors in the two regions, so the focus of their cooperation in recent years has been village development. One of the villages that is trying to participate in this collaboration is Sumbermulyo village. This study aims to explain the reasons for the involvement of Sumbermulyo village within the framework of the sister-province cooperation carried out by the Province of D.I. Yogyakarta with Gyeongsangbuk-Do. The method used in this study is qualitative research with data collection techniques in the form of interviews with relevant stakeholders accompanied by a literature study. The results of this study indicate that the involvement of the Sumbermulyo village government in the framework of sister-province cooperation between D.I. Yogyakarta and Gyeongsangbuk-do are based on the village's need for modern agricultural knowledge resources and funding for infrastructure development after the 2008 disaster. The choice of accepting this collaboration has taken into account Law No. 03 of 2008 concerning cooperation with foreign parties, although the points of similarity in administrative status are slightly incompatible, thus requiring a third party as a facilitator of the cooperative relationship between them.

Keywords - Cooperation, Sister-province, Rural development.

Abstrak

Provinsi D.I. Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan Provinsi Gyeongsangbuk-Do dalam waktu yang cukup lama. Dalam perjalanannya, kerjasama ini sudah melibatkan berbagai aktor di kedua wilayah, hingga fokus kerjasama keduanya dalam beberapa tahun terakhir ini adalah pembangunan desa. Salah satu desa yang mencoba ikut berpartisipasi dalam kerjasama ini adalah desa Sumbermulyo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut alasan keterlibatan desa Sumbermulyo dalam kerangka kerjasama *sister-province* yang dilakukan oleh Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dengan stakeholder terkait disertai studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa Sumbermulyo dalam kerangka kerjasama *sister-province* antara D.I. Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do didasari oleh kebutuhan desa akan sumber daya pengetahuan pertanian modern dan pendanaan pembangunan infrastruktur paska bencana tahun 2008. Pilihan atas penerimaan kerjasama ini telah memperhatikan UU Nomor 03 Tahun 2008 tentang kerjasama dengan pihak luar negeri, meskipun pada poin kesamaan status administrasi sedikit tidak berkesesuaian, sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai fasilitator dari hubungan kerjasama keduanya.

Kata kunci - Kerjasama, Sister-province, Pembangunan, Desa

1. Pendahuluan

Kerjasama *sister-province* merupakan suatu konsep kerjasama yang telah berkembang sejak tahun 1950-an. Konsep kerjasama ini bermula dari gagasan Presiden Amerika Serikat di tahun 1956 dengan tujuan kerjasama sebagai sarana bagi pemerintahan tingkat regional untuk menjalin hubungan diplomatik di tingkat internasional (Titiyani, 2014). Perkembangan hubungan diplomatik antar negara dalam politik global membawa kerjasama ini menjadi sebuah trend baru bentuk kerjasama bagi sub wilayah terkecil dalam negara untuk mengembangkan wilayahnya. Indonesia secara resmi memberikan kesempatan bagi wilayah untuk melakukan kerjasama *sister-province* melalui pengesahan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Rusandi, 2017). Landasan hukum tersebut semakin membuka kesempatan bagi sub pemerintahan terkecil dalam negara untuk bekerjasama diluar batas wilayah negaranya. Peluang meningkatkan potensi wilayah melalui kerjasama *sister-province* telah dimanfaatkan oleh beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.

Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang telah melakukan kerjasama *sister-province* dengan beberapa wilayah di tingkat internasional. Berdasarkan data BKPM Yogyakarta terdapat empat negara yang sejak lama menjalin kerjasama *sister-province* dan terus berlangsung sampai saat ini (Jogjainvest.jogjaprovo.go.id). Korea Selatan adalah satu dari empat negara mitra kerjasama Yogyakarta. Kerjasama dengan Korea Selatan sudah terlaksana cukup lama dengan tidak hanya satu sub wilayah provinsi di negeri ginseng tersebut, salah satunya adalah provinsi Gyeongsangbuk-Do. Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-Do

bekerjasama dalam kerangka *sister-province* selama hampir 14 tahun. Program kerjasama bermula dari tingkat provinsi kemudian berkembang ke daerah-daerah di Yogyakarta. Pada lima tahun terakhir, Gyeongsangbuk-Do mulai menjalin kerjasama tidak hanya pada tingkat provinsi, namun sudah sampai ke tingkat pemerintah desa di Yogyakarta. Program ini berawal dari pengiriman tenaga PNS Biro Kerjasama Provinsi Yogyakarta ke Korea Selatan dalam rangka pendidikan bahasa di tahun 2008. Pada tahun 2009, Desa Kampung di Kecamatan Ngawen Gunungkidul diberikan program pemberdayaan masyarakat melalui prinsip Saemaul Undong dan pembangunan gedung serba guna desa. Keberhasilan kerjasama di Desa Kampung, Ngawen, membawa kerjasama bersama pemerintah desa di wilayah Yogyakarta meluas seperti di tahun 2011 diadakan kegiatan Korean Youth Saemaul Volunteer bertempat di Desa Karangtalun, Imogiri (Mukti,2013).

Program kerjasama pemberdayaan desa dimulai dari desa Kampung Kecamatan Ngawen yang telah berhasil terlaksana di tahun 2009. Keberhasilan kerjasama di desa Kampung memberikan gambaran kepada beberapa desa lainnya di Yogyakarta untuk menginisiasi kerjasama dengan provinsi Gyeongsangbuk-Do. Pada periode berikutnya, provinsi Gyeongsangbuk-Do menawarkan kepada desa Sumbermulyo untuk menjadi *pilot project* dalam kerangka kerjasama *sister-province* dengan D.I. Yogyakarta. Bagi Gyeongsangbuk-Do diharapkan desa Sumbermulyo dapat berkembang menjadi pedesaan maju seperti kawasan pedesaan di Korea Selatan dengan menerapkan konsep Saemaul Undong sebagai gagasan pembangunan bagi masyarakat desa. Ditinjau dari aspek demografi, desa Sumbermulyo dan pedesaan di Korea Selatan memiliki perbedaan yang cukup

signifikan. Secara umum, Sumbermulyo mempunyai potensi dan ketersediaan sumber daya tetapi untuk menerapkan konsep Saemaul Undong dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengimbangi untuk menjalankan berbagai program pembangunan desa tersebut.

Selain itu, karakteristik geografis dan sistem pengelolaan desa di kedua wilayah juga berbeda. Perbedaan tersebut tidak menghalangi kedua wilayah untuk melakukan kerjasama. Oleh karena itu, timbul pertanyaan Mengapa pemerintah desa Sumbermulyo ikut berpartisipasi menjadi *pilot project* dalam kerangka kerjasama *sister-province* yang dilakukan pemerintah D.I. Yogyakarta dengan pemerintah Gyeongsangbuk-Do?

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Model Pilihan Rasional

Pilihan rasional adalah salah satu konsep yang menjelaskan terdapat pengambilan keputusan untuk menindaklanjuti suatu hal diperlukan pertimbangan atau opsi-opsi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Coleman (Apriliansi & Mukti, 2017) konsep pilihan rasional memiliki dua unsur pokok pertimbangan jika berbicara dalam aspek kerjasama yaitu, unsur aktor dan unsur sumber daya. Sumber daya didefinisikan sebagai suatu objek yang dapat menarik dan mempengaruhi para aktor. Teori ini menggambarkan proses untuk pengambilan sebuah keputusan, mulai dari proses pendefinisian sebuah situasi yang didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi (Dewi, 2018). Pada model pilihan rasional kontemporer diketahui bahwa tindakan rasional seorang aktor rasional tidak hanya berdasar pada

preferensi aktor tersebut, namun juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sosial dari keterlibatannya pada jaringan sosial dan organisasional. Dalam konteks ini, aktor rasional tidak selalu mengambil keputusan demi kepentingan pribadinya, tetapi juga memainkan perannya untuk mewujudkan kepentingan orang lain bahkan masyarakat luas (Radjab, 2014).

Menurut Coleman, tindakan seseorang dilakukan dengan memanfaatkan suatu barang atau sumber daya untuk mencapai tujuannya, sehingga dijelaskan bahwa unsur penting dari model pilihan rasional itu adalah mengetahui siapa aktor pengambil kebijakannya dan sumber daya yang dimilikinya (Srigustini & Afriza, 2018). Model pengambilan keputusan ini merupakan adaptasi dari teori mikroekonomi dimana rasionalitas mengacu pada *cost and benefit* yang disebut Axelrod dengan *payoff structure*, yaitu keputusan dibuat berdasarkan alternatif yang paling menguntungkan bagi kepentingan aktor tersebut. *Payoff structure* ini digambarkan berdasarkan preferensi si aktor atas kepentingannya, sehingga terdapat tiga dimensi yang dipakai oleh si aktor dalam memberikan keputusan akan memilih bekerjasama atau menolak sebuah kerjasama, yakni:

1. Keuntungan timbal balik dimana informasi yang diterima oleh aktor rasional menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin akan saling menguntungkan.
2. *The shadow of future* merupakan pertimbangan aktor rasional dalam melihat kerjasama tersebut pada jangka yang panjang atau di masa depan, apabila kerjasama disepakati dalam jangka panjang maka informasi mengenai mitra kerjasama yang didapat akan semakin akurat dan *feedback* antar aktor akan diproses semakin cepat.

3. Jumlah aktor dinilai sebagai salah satu pertimbangan yang mempengaruhi aktor rasional dalam mengambil keputusan untuk bekerjasama atau tidak, sebab semakin sedikit aktor dalam kerjasama tersebut maka akan semakin mudah memprediksi tindakan dari aktor dan proses pengambilan keputusan dalam kesepakatan akan lebih singkat. (Rinayuhani,2017)

Beberapa dimensi diatas menjadi faktor-faktor pertimbangan rasionalitas dari aktor rasional untuk mengukur *cost-benefit* yang akan didapatkan, namun pada kenyataannya semua keuntungan yang diinginkan tidak dapat terpenuhi, oleh karenanya aktor harus membatasi kepentingan apa yang menjadi utama untuk dicapai dalam kerjasama, sehingga kerugian yang diterima sangat meminimal.

3. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering menggunakan teknik pengumpulan dan analisa data non-numerik. Karena metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena disekitar sehingga memusatkan peneliti untuk memahami secara mendalam makna dan proses yang terbentuk (Bakry, 2015). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pembentukan kerjasama dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penentuan keputusan kerjasama dilakukan pengambilan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada pejabat pemerintah desa Sumbermulyo dan penanggung jawab program kerjasama desa Sumbermulyo pada periode 2013-2015 berdasarkan penyusunan RPJMDes Sumbermulyo. Kemudian perjanjian

kerjasama dan dokumen peraturan desa serta rencana pembangunan desa Sumbermulyo pada kurun waktu tersebut menjadi sumber data primer lainnya sebagai pendukung dari data wawancara. Pemilihan pejabat pemerintah desa dan penanggung jawab program diambil sebagai informan sebab mereka direpresentasikan sebagai aktor pengambil keputusan yang akan memperhitungkan rasionalitas dari keputusannya serta pihak yang menjadi perwakilan dari kebutuhan masyarakat desa Sumbermulyo. Jangka waktu 2013 sampai dengan 2015 dipilih sebagai kurun waktu penelitian karena selang waktu tersebut merupakan proses peninjauan *project* antara Gyeongsangbuk-Do dengan Yogyakarta dalam bidang pembangunan desa di September 2015. Data wawancara merupakan data primer dari analisa pada penelitian ini. Sedangkan studi kepustakaan akan menjadi data sekunder untuk mendukung analisa dari rumusan masalah dan juga data primer. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur tentang kerjasama *sister-city* yang terkait, mulai dari surat kabar, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Sumbermulyo dan Gyeongsangbuk-Do

Desa merupakan struktur pemerintah yang paling bawah dan sangat strategis karena dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat. Desa juga merupakan salah satu unit yang efektif dalam mendorong pertumbuhan masyarakat, oleh karenanya pemerintah desa diberikan otoritas dari pemerintah pusat untuk dapat mengembangkan dan mengelola kehidupan masyarakat dalam suatu desa. *Sister City* merupakan salah satu bentuk

kebebasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang telah diatur sejak tahun 1993 dan baru disahkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desa Sumbermulyo merupakan salah satu desa yang melakukan kerjasama *sister-city* dengan Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan. Kerjasama itu telah berjalan cukup lama dan berorientasi terhadap pengembangan masyarakat. Jika dilihat dari segi geografis, desa Sumbermulyo terletak di kabupaten Bantul khususnya di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas lahan 8819.9320 Ha (Wawancara, November 2019). Wilayah kelurahan Sumbermulyo terbagi ke dalam 16 dusun yakni: Karutan, Silen, Tangkulan, Kutu, Kedon, Kaligondang, Gedongan, Gunung, Jogodayoh, Plumbungan, Caben, Samen, Gersik, Bondalen, Kintelan dan Cepoko, dari ke 16 dusun tersebut desa Sumbermulyo terdiri dari 9.000 jiwa perempuan dan 9.525 jiwa laki-laki dari total jumlah penduduk sebesar 18.525 jiwa berdasarkan data penduduk desa Sumbermulyo pada pertengahan tahun 2016 (Wawancara, November 2019). Besarnya jumlah penduduk ternyata, sebagian besar masyarakat desa Sumbermulyo berprofesi sebagai petani, untuk itu desa Sumbermulyo berkarakteristik sebagai kawasan agraris (pertanian teknik). Selain pertanian kawasan tersebut juga didukung oleh beberapa potensi lainnya seperti: peternakan, perikanan, perkebunan dan buah-buahan lahan pekarangan, *home industry*, jasa dan perdagangan serta berpotensi sebagai desa wisata religius.

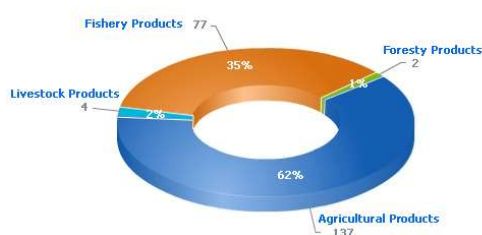
Sedangkan, Gyeongsangbuk-Do sendiri merupakan salah satu provinsi di Korea Selatan dengan perkembangan industri dan pertanian yang sangat maju. Provinsi ini berjarak sekitar 170 sampai 430 km dari ibu kota Korea Selatan, yaitu Seoul. Selain kemajuan industri,

Gyeongsangbuk-Do juga menjadi salah satu provinsi produsen pertanian terbesar di Korea Selatan, khususnya untuk tanaman padi (Gyeongsangbuk-Do Website, 2019). Meskipun, iklim di provinsi ini termasuk dalam kategori iklim ekstrim baik di musim panas maupun dingin, namun provinsi ini tetap menjadi salah satu produsen pertanian terbesar di Korea Selatan. Letak Gyeongsangbuk-Do yang berbatasan langsung dengan Jepang menjadikan salah satu faktor kemajuan ekonomi di wilayah ini cukup, terutama sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di tahun 1988 (Mukti, 2013). Sebelumnya, wilayah ini merupakan pedesaan yang masih cukup terbelakang dan terdampak cukup besar akibat perang, sehingga dibutuhkan sebuah gerakan untuk membangkitkan semangat pembangunan paska perang di wilayah ini. Kemudian, muncul gerakan Saemaul Undong yaitu sebuah gerakan pembaharuan pedesaan, sehingga wilayah pedesaan di Gyeongsangbuk-Do dapat berkembang pesat sampai seperti saat ini. Pengalaman di masa lalu membuat Korea Selatan bermaksud menyebarkan semangat pembangunan pedesaan ke berbagai wilayah di dunia dan Gyeongsangbuk-Do menjadi daerah yang memiliki Akademi Saemaul Undong yakni tempat pelatihan dari gerakan ini untuk para delegasi dari setiap negara di dunia (Mukti, 2013). Oleh sebab itu, Gyeongsangbuk-Do memfokuskan kerjasama ke luar negeri lebih mengarah kepada gerakan pembangunan desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kerjasama ini telah terjalin di beberapa negara, seperti Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Kondisi geografis dari Sumbermulyo dan Gyeongsangbuk-Do sendiri tidak jauh berbeda, karena keduanya merupakan wilayah pedesaan yang dikelilingi oleh pegunungan dan berjarak tidak jauh dengan

laut. Ini menyebabkan pertanian di kedua wilayah ini dapat menjadi suatu komoditas unggul bagi wilayahnya. Pertanian di Gyeongsangbuk-Do merupakan salah satu komoditas ekspor paling banyak, hal ini dapat tergambar dari diagram berikut:

Gambar 1. Komoditas Ekspor Gyeongsangbuk-Do



Sumber: Gyeongsangbuk-Do Website Business

Gyeongsangbuk-Do juga menjadi salah satu provinsi dengan hasil pertanian tertinggi setiap tahunnya dengan salah satu produk unggulannya adalah padi dengan menyumbangkan angka 14% pada hasil pertanian Korea Selatan atau disetarakan pada peringkat keempat terbanyak dari seluruh wilayah di Korea Selatan. Untuk produk lainnya, seperti apel, anggur, melon, buah persik, dan paprika merah menempati urutan pertama sebagai produsen hasil pertanian tertinggi di Korea Selatan. Oleh karenanya, provinsi ini memiliki sistem pertanian yang sudah cukup maju, meskipun berada di iklim ekstrim, namun tidak menghambat hasil panen mereka setiap musim panen. Dari diagram diatas juga tergambar bahwa hasil pertanian berada di angka paling besar pada komoditas ekspor yaitu sekitar 137 juta dolar Amerika atau kurang lebih 62%.

Untuk produk ekspor terbesar lainnya adalah perikanan yaitu diangka 77 juta dolar Amerika (Gyeongsangbuk-Do Website, 2019). Gambaran hasil pertanian diatas menunjukkan bahwa Gyeongsangbuk-Do memiliki ciri khas

pada produk pertaniannya dan mengembangkan produknya cukup baik sebab mereka tetap dapat melakukan pertanian dengan hasil yang baik di iklim ekstrim. Desa Sumbermulyo juga menjadi salah satu produsen pertanian terbesar di Provinsi Yogyakarta. Setiap musim panennya, desa ini dapat memberikan hasil panen cadangan bagi persediaan produk beras bagi Yogyakarta. Hasil panen desa Sumbermulyo berkisar sekitar tujuh sampai sembilan ton per hektar setiap kali masa panen (Wawancara, November 2019). Maka dari itu, kedua wilayah ini memiliki kesamaan karakteristik dari segi produk unggulan pertanian. Hal ini berkesesuaian dengan poin kedua dari pasal 5 UU Nomor 3 Tahun 2008 mengenai syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan kerjasama *sister-city*. Pertanian merupakan salah satu karakteristik yang mencerminkan kedua wilayah ini.

4.2 Proses Pembentukan Kerjasama Sumbermulyo-Gyeongsangbuk-Do

Pemberdayaan desa merupakan salah satu fokus program kerjasama bagi Gyeongsangbuk-Do. Diatas telah disebutkan bahwa Gyeongsangbuk-Do sendiri memiliki sebuah akademi gerakan pembaharuan desa atau biasa dikenal dengan Akademi Saemaul Undong. Provinsi Gyeongsangbuk-Do juga memiliki peran sebagai penggerak organisasi regional yaitu *North East Asia Regional Governments Association* (NEAR) dan menjadi salah satu kantor pusatnya di tahun 2005. Ini dilatarbelakangi oleh kesiapan Gyeongsangbuk-Do dari segi ekonomi dan anggaran negara (Mukti,2013). Kerjasama antar wilayah diluar batas wilayahnya telah banyak dilakukan provinsi ini di berbagai wilayah, tidak hanya Yogyakarta. Gyeongsangbuk-Do telah menjalin

kerjasama *sister-province* dengan wilayah diluar batas negaranya sejak tahun 1984 yaitu bekerjasama dengan pemerintah Ohio di Amerika Serikat. Selanjutnya di tahun 1995 memulai kesepakatan kerjasama bersama pemerintah Irkutsk, Rusia. Kerjasama *sister-city* dilakukan tidak hanya dengan negara maju tetapi juga dengan negara berkembang lainnya, salah satunya Thaingnyen, Vietnam di tahun 2005 (Gyeongsangbuk-Do Website,2020).

Ini menunjukkan bahwa Gyeongsangbuk-Do membuka kerjasama ke berbagai wilayah di belahan dunia tidak berdasarkan kategori maju ataupun berkembang, tapi memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama *sister-city*, seperti kesamaan administrasi dan karakteristik, permasalahan, dan fokus dari kerjasama yang ingin dicapai hasilnya.

Pada era globalisasi, Korea Selatan berniat untuk membangun negara-negara berkembang lainnya melalui sistem pedesaan seperti yang dilakukannya sehingga dapat berkembang pesat saat ini. Penyebaran gagasan gerakan Saemaul Undong dilakukan oleh Gyeongsangbuk-Do agar negara berkembang dapat memperbaharui sistem pedesaannya dan tidak mengesampingkan semangat pembaharuan dari desa.

Pemilihan Yogyakarta sebagai salah satu mitra kerjasama Gyeongsangbuk-Do juga didasari oleh semangat pembangunan desa tersebut. Kerjasama Gyeongsangbuk-Do dengan desa-desa di Yogyakarta dimulai pada tahun 2009 di desa Kampung, Ngawen dengan program menerapkan prinsip hidup bekerja keras, disiplin dan bergotong-royong agar masyarakat di desa tersebut memiliki semangat berkembang menjadi masyarakat yang lebih maju namun tidak meninggalkan nilai-nilai kehidupan di desa. Simbol dari program pembangunan desa ini adalah pembangunan gedung serbaguna desa yang

diberinama sebagai gedung Saemaoul. Kampung Ngawen juga berhasil membudidayakan penggemukan 15 sapi sebagai salah satu produk unggulan dari desa ini. Setelah itu, program kerjasama pemberdayaan desa ini semakin meluas ke wilayah desa Salamrejo, Kulon Progo di tahun 2010 (Indraswari,2015).

Keberhasilan di program pengembangan desa tersebut membuat Gyeongsangbuk-Do membuka kembali peluang kerjasama dengan desa-desa lainnya di Yogyakarta pada tahun 2015.

Sumbermulyo adalah salah satu desa yang diberikan penawaran kerjasama pengembangan desa oleh Gyeongsangbuk-Do. Penawaran terkait kerjasama ini dimulai dari pihak ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat Penabulu yang menjembatani terciptanya kerjasama antara pemerintah desa Sumbermulyo dengan Gyeongsangbuk-Do. Pada awalnya, Sumbermulyo sekitar tahun 2007/2008 mengalami kondisi paska bencana alam. Keadaan ini membuat desa Sumbermulyo mendapat banyak bantuan dari berbagai dinas terkait di Provinsi D.I Yogyakarta dan juga Kabupaten Bantul. Desa Sumbermulyo mendapat banyak perbaikan, infrastruktur seperti jalan, jembatan, perbaikan rumah, karena berhasil bangkit paska bencana, Sumbermulyo diberi penghargaan dari pemerintah sebagai salah satu desa yang telah menerapkan *good government*. Ketahanan desa Sumbermulyo paska bencana menarik datangnya pihak-pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat untuk menawarkan berbagai program kerjasama karena Sumbermulyo dilihat berhasil menangani kondisi desa paska bencana.

4.3 Analisis Penerimaan Kerjasama Sister-City desa Sumbermulyo

Pada kurun waktu 2007 dan 2008, Sumbermulyo adalah salah satu desa yang terdampak bencana Yogyakarta. Perjalanannya membawa desa ini untuk bangkit dan menata kembali pembangunan di desa tersebut. Proses tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya bantuan dari pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan pihak ketiga lainnya. Pertanian yang menjadi komoditas unggul dari sebagian besar pendapatan desa ini juga harus memiliki perbaikan dan ketahanan sehingga apabila bencana terjadi kembali, maka kerugian pada sektor ini dapat diminimalisir.

Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan rasional dari pemerintah desa Sumbermulyo dalam menerima kerjasama dengan pihak Gyeongsangbuk-Do. Berdasarkan dimensi keuntungan timbal balik, keputusan menerima kerjasama dengan pihak Korea Selatan adalah salah bentuk tindakan yang dapat mengakomodasi pembangunan desa Sumbermulyo khususnya dalam pertanian. Gyeongsangbuk-Do telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu provinsi dengan produk unggulan pertanian di Korea Selatan dan memiliki sistem pertanian yang sudah cukup maju. Ini bisa dilihat dengan tidak adanya halangan provinsi ini pada setiap musim panen meskipun berada dalam iklim ekstrim.

Sistem pertanian di Gyeongsangbuk-Do telah menerapkan teknologi sebagai alat bantu untuk memaksimalkan pertanian serta beralih pada pertanian organik sehingga meningkatkan nilai jual dari produk pertanian mereka. Kerjasama pada peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pertanian akan membawa keuntungan maksimal bagi desa Sumbermulyo, sebab desa akan

mendapatkan pertukaran pengetahuan dan fasilitas pada pengembangan pertanian, selain itu desa Sumbermulyo dapat meningkatkan ketahanan bencana dan pangan. Bencana ataupun kondisi iklim tidak akan mempengaruhi hasil panen desa selanjutnya.

Keuntungan lainnya yang didapat dari kerjasama ini adalah pendanaan untuk pengembangan pertanian dan infrastruktur desa. Dalam hal ini, pemerintah desa Sumbermulyo dan Kabupaten Bantul serta Provinsi Yogyakarta mendapat keringanan beban finansial untuk perbaikan dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa. Seperti kebanyakan wilayah paska bencana lainnya, keuangan daerah tersebut masih dalam proses pemulihan akibat banyaknya kerugian pada saat bencana. Pemerintah desa Sumbermulyo menilik kembali pada kerjasama Gyeongsangbuk-Do di desa Kampung dan Salamrejo yang mana desa diberikan bantuan pembangunan gedung serba guna desa untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pertaniannya dan pengembangan produk unggul, selain itu diketahui bahwa setiap desa dibantu meningkatkan pendapatan dari produk unggulnya dengan mengembangkan komoditas tersebut bernilai jual tinggi ketika diekspor. Program-program kerjasama pada desa sebelumnya yang berhasil memajukan desa-desa tersebut menjadi salah satu motivasi bagi pemerintah desa Sumbermulyo menerima kerjasama ini.

Pada UU Nomor 03 tahun 2008 juga ditekankan bahwa kesamaan permasalahan harus menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam menerima tawaran kerjasama *sister-city* dari pihak luar. Sumbermulyo dan Gyeongsangbuk-Do sama-sama memiliki permasalahan yang sama yaitu pada bidang pertanian. Sebelumnya, Gyeongsangbuk-Do juga

pernah mengalami hal yang sama. Korea Selatan sempat menjadi salah satu negara termiskin di dunia, kemudian gerakan Saemaul Undong memberikan pembangunan baru bagi masyarakat pedesaan di Korea Selatan sehingga nilai-nilai potensi lokal tidak terlepas.

Desa adalah salah satu penyumbang pembangunan terbaik bagi Korea Selatan melalui sistem Saemaul Undong. Masyarakat di pedesaan Korea Selatan berhasil bangkit dan memajukan desa mereka tanpa meninggalkan nilai lokal meskipun perkembangan industri dan teknologi cukup pesat disana. Kesamaan permasalahan tersebut adalah salah satu alasan pihak Korea Selatan ingin menyebarkan semangat pembaharuan pedesaan. Disamping itu, Saemaul Undong dapat dijadikan konsep baru pembangunan yang sesuai dengan negara berkembang, sehingga persepsi terkait pembangunan hanya akan dikuasai negara maju mulai terkikis. Meskipun Gyeongsangbuk-Do sudah berkembang menjadi sebuah provinsi dengan kawasan pedesaan yang maju saat ini, namun Gyeongsangbuk-Do bisa berbagi pengetahuan dan langkah-langkah kepada daerah berkembang lainnya agar bangkit dari keterbelakangan pembangunan dan mengedepankan semangat pembangunan bersama.

Dimensi lainnya untuk melihat rasionalitas dalam keputusan bekerjasama dari sisi Sumbermulyo adalah prediksi akan bayangan masa depan. Pada dimensi ini akan jangka waktu kerjasama akan mempengaruhi keuntungan yang akan didapat setiap pihak dalam kerjasama dan juga mempertimbangkan kerugian-kerugian yang akan terjadi selama kerjasama. Seperti disebutkan dalam MoU antara Sumbermulyo, Gyeongsangbuk-Do dan Yayasan Penabulu bahwa kerjasama dilakukan dalam kurun waktu lima tahun. Kesepakatan ini tercantum pada pragraf

pembukaan MoU kerjasama antara ketiga pihak tersebut yang menyatakan bahwa Pemerintah desa Sumbermulyo dan *Saemaul Global Foundation* (pemerintah Gyeongsangbuk-Do) dan Yayasan Penabulu bersepakat untuk saling bekerjasama dalam program peningkatan kapasitas dan penguatan nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintah desa yang baik selama periode 2015-2020 (Kesepakatan Kerjasama Sumbermulyo, 2015). Jangka waktu kerjasama yang ditawarkan juga cukup panjang. Hal ini akan menguntungkan bagi Sumbermulyo sebagai *pilot project program* kerjasama tersebut. Asumsinya desa akan mendapat lebih banyak pembelajaran dan pendampingan pada produk pertaniannya sampai bisa mengembangkan secara mandiri produk pertanian unggulannya. Selain itu, interaksi dengan mitra kerjasama yaitu Gyeongsangbuk-Do bisa diprediksikan ke depannya dan komunikasi yang dilakukan juga akan diharapkan dapat menghasilkan kerjasama berikutnya tanpa perlu fasilitator sebagai pihak ketiga pada kerjasama tersebut. Kurun waktu lima tahun itu juga dapat menarik investor-investor dari Korea Selatan untuk berinvestasi di desa Sumbermulyo yang sedang dalam tahap pembangunan. Kehadiran investor asing ini akan meminimalkan sumber daya finansial pemerintah untuk mengelola infrastruktur di desa Sumbermulyo. Lamanya waktu kerjasama juga akan menciptakan kepercayaan terhadap komitmen antara Sumbermulyo dan Gyeongsangbuk-Do dalam kerjasama. Oleh karena itu, dimensi ini telah terpenuhi untuk dipetakan oleh pemerintah Sumbermulyo dalam menerima kerjasama dengan Gyeongsangbuk-Do.

Berkaitan dengan dimensi prediksi akan bayangan masa depan kerjasama, pemerintah Sumbermulyo juga mempertimbangkan jumlah aktor dalam

kerjasama yang disepakati. Kerjasama yang ditawarkan pihak Gyeongsangbuk-Do ini hanya melibatkan satu mitra luar batas negara saja, yakni pemerintah Gyeongsangbuk-Do. Keterlibatan Yayasan Penabulu dalam kerjasama dianggap hanya sebagai fasilitator pengantar kerjasama antar kedua wilayah sehingga diperhitungkan tidak akan membawa kesulitan akan komunikasi dan prediksi tindakan para aktor dalam kerjasama. Tiga aktor dalam sebuah kerjasama dianggap masih dalam batas efisien pada sebuah kerjasama sebab setiap aktor akan mudah berinteraksi satu dengan lainnya dan memetakan setiap tindakan dari mitra-mitra kerjasamanya.

Program-program kerjasama pemerintah Gyeongsangbuk-Do di desa-desa sebelumnya yang telah berhasil juga menjadi salah satu alasan kepercayaan pemerintah desa Sumbermulyo menerima kerjasama tersebut. Desa Kampung yang telah berhasil meningkatkan ternak sapihnya sebagai komoditas unggul desa dan desa Salamrejo telah mengembangkan kerajinan anyaman sampai menjadi komoditas ekspor memberikan gambaran kepada Sumbermulyo terhadap bayangan hasil kerjasama dengan pihak Gyeongsangbuk-Do.

Kerjasama dengan Gyeongsangbuk-Do ini adalah perwujudan upaya saling melengkapi antara kedua wilayah dalam bidang komoditas ekspor pertanian. Diketahui bahwa Gyeongsangbuk-Do sedang berusaha mengembangkan benih padi organik sebagai salah satu cara untuk menaikkan nilai jual hasil pertanian mereka. Kerjasama ini memberikan masukan baru bagi pengembangan benih pertanian organik untuk Gyeongsangbuk-Do untuk menyesuaikan benih tersebut terhadap jenis tanah dan iklim wilayah, maka pada saat disebarluaskan ke wilayah-wilayah lain juga menghasilkan produk

pertanian unggul seperti di Gyeongsangbuk-Do. Kerjasama *sister-city* oleh pemerintah Gyeongsangbuk-Do lebih memfokuskan kepada semangat pembaharuan desa melalui sistem Saemaul Undong. Ini menghidupkan nilai-nilai gotong royong yang perlahan tergerus oleh perkembangan jaman di desa Sumbermulyo. Oleh karenanya, semangat masyarakat akan pengembangan produk pertanian semakin hari semakin luntur. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat dari kemajuan pengembangan pertanian di desa. Untuk Gyeongsangbuk-Do, kerjasama ini menjadi ajang untuk menyebarkan nilai pembangunan ala Korea Selatan ke berbagai belahan dunia, terutama ke negara-negara berkembang. Kerjasama yang terjalin antara kedua wilayah menunjukkan upaya saling melengkapi satu dengan lainnya khususnya di bidang pertanian sebab kedua wilayah memiliki kesamaan karakteristik pada komoditas unggulannya yaitu produk pertanian.

Pada poin terakhir pasal 5 UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang kerjasama dengan pihak luar negeri disebutkan bahwa kerjasama yang terjalin harus berfokus pada peningkatan hubungan masyarakat. Untuk poin ini, pemerintah desa Sumbermulyo telah melihat bahwa pada program kerjasama yang ditawarkan bertepatan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat sipil desa dan pengembangan nilai-nilai demokrasi. Ini menggambarkan bahwa fokus dari kerjasama ini adalah peningkatan pada hubungan setiap lapisan masyarakat baik itu pemerintah desa, kelompok tani desa, dan satuan-satuan kecil lainnya di lingkup desa agar gerakan pembangunan desa dapat bersinergi hingga entitas paling kecil dalam desa. Kerjasama ini juga sebelumnya telah dibahas sekali dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

Sumbermulyo, walaupun keberlanjutan penajakan kerjasama dan proseduralnya dilanjutkan oleh pihak ketiga yakni Yayasan Penabulu sebagai fasilitator antara Gyeongsangbuk-Do dan Sumbermulyo. Keterlibatan Yayasan Penabulu ini yang mempermudah proses prosedural pembentukan kerjasama antara Gyeongsangbuk-Do dan Sumbermulyo, walaupun kedua wilayah ini memiliki status administrasi berbeda yaitu provinsi dan desa. Kondisi ini tidak berkesesuaian dengan poin satu dari UU Nomor 03 Tahun 2008, namun kehadiran pihak ketiga dapat menjadi solusi pembentukan kerjasama antara kedua wilayah yang berbeda status administrasinya, sebab lembaga swadaya masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam lingkup kerjanya sehingga mempermudah segala proses pembentukan kerjasama. Disamping itu, kehadiran pihak ketiga dalam kerjasama tersebut juga perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes tahun 2013 sampai 2018 tentang penguatan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan pelayanannya. Lembaga swadaya masyarakat adalah representasi dari publik, jika kerjasama yang dilaksanakan berhasil maka akan ada kepercayaan publik yang meningkat melalui lembaga swadaya masyarakat tersebut. Program pengembangan produk pertanian yang ditawarkan pada kerjasama ini juga merupakan representasi dari rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2013-2018 yang tertuang mengenai peningkatan dan penguatan serta pembaharuan bidang pertanian. Oleh sebab itu, penerimaan kerjasama dengan Gyeongsangbuk-Do sepenuhnya adalah tindakan rasional yang diambil pemerintah desa Sumbermulyo untuk mewujudkan rencana pembangunan desanya sesuai dengan RPJMDes tahun 2013-2018.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara garis besar, keputusan pemerintah desa Sumbermulyo menerima kerjasama dengan Gyeongsangbuk-Do atas dasar tindakan rasional untuk meningkatkan dan membantu pertanian serta pembangunan infrastruktur desa, terutama paska bencana di tahun 2008. Pilihan atas penerimaan kerjasama ini telah memperhatikan UU Nomor 03 Tahun 2008 tentang kerjasama dengan pihak luar negeri, meskipun pada poin kesamaan status administrasi sedikit tidak berkesesuaian. Hal tersebut dapat teratasi dengan adanya pihak ketiga sebagai jembatan penghubung kedua wilayah untuk bekerjasama walau pada status administrasi wilayah yang berbeda. Kerjasama ini juga dilihat memberikan keuntungan terhadap secara maksimal atau sampai *pada payoff structure* sebab telah memenuhi ketiga dimensi dari pilihan rasional dalam kerjasama. Pertama, keuntungan timbal balik didapatkan kedua nya khususnya Sumbermulyo yang mendapatkan pertukaran pengetahuan tentang pembangunan desa dan pertanian serta pendanaan terkait infrastruktur desa, seperti bangunan dan lantai jemur pertanian. Bagi Gyeongsangbuk-Do, kerjasama ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan menyebarkan konsep pembangunan desa ala Korea Selatan kepada masyarakat dunia, khususnya di negara-negara berkembang serta pengembangan eksperimen benih organik pertanian yang menjadi unggulan provinsi tersebut. Kedua, jangka waktu kerjasama yang ditawarkan selama lima tahun dianggap cukup efektif untuk meningkatkan kepercayaan dan memprediksi segala tindakan yang bisa terjadi selama program kerjasama terlaksana. Ketiga, jumlah aktor yang

terlibat dalam kerjasama terbilang sedikit dan memadai untuk kerjasama ditingkatkan pemerintahan desa, sebab banyaknya aktor dalam kerjasama maka akan menimbulkan banyak prosedural yang harus dilalui serta proses negosiasi yang cukup panjang dalam merumuskan kerjasama. Proses pembentukan kerjasama antara Gyeongsangbuk-Do dan Sumbermulyo telah menggambarkan bahwa kedepannya kerjasama ini dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dan telah mempertimbangkan berbagai faktor agar mengurangi resiko kerugian di masa depan. Namun, proses perumusan dan pelaksanaan kerjasama nantinya tidak akan mencapai semua target yang dirumuskan pada awal kesepakatan kerjasama, maka perlu evaluasi pada setiap pelaksanaan kerjasama untuk memberikan gambaran pertimbangan keberlanjutan kerjasama.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian Universitas AMIKOM Yogyakarta sebagai sponsor dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

Acuan dari Buku:

- Ali Mukti. T, 2013, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia, Phinisi Press : Yogyakarta.
- Bakry, Umar Suryadi, 2015, Metode Penelitian Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Acuan artikel dalam Jurnal:

- Damayanti. Nadia, 2018, "Strategi Pengembangan Kerjasama Sister-City Kota Semarang, Indonesia-Brisbane, Australia, Efficient :

Indonesian Journal of Development Economics", Vol.1, No.1.

Dewi. Nevy Rusmania, 2018, "Pendekatan Rational Choice Pada Reformasi Ekonomi DOI MOI Di Vietman", dalam Politea Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol 1, No. 2.

Indraswari. Firstyarinda Valentina, 2015, "Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pengembangan Desa Melalui Sistem Saemaul Undong (Studi Kasus Kerjasama Lintas Batas Daerah Istimewa Yogyakarta-Gyeongsangbuk-Do)", dalam Jurnal Transformasi Global, Vol.2, No.2.

Primawanti. Henike, Dermawan. Windy, Ardiyanti. Widiya, 2019, "Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema Sister-City," dalam Journal of Political Issues, Vol.1, No.1.

Radjab. Mansyur, 2014, "Analisis Model Tindakan Rasional Pada Proses Transformasi Komunitas Petani Rumput Laut Di Kelurahan Pabiringa Kabupaten Jeneponto", dalam Jurnal SOCIUS, Vol.XV.

Rinayuhani. Tri Ratna, 2017, "Rational Choice Dalam Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan PT.Freeport Indonesia," dalam Jurnal Politik, Vol.13, No.1.

Rochman. Gian Puspitasari, 2019, "Pengelolaan Kota Melalui Jejaring Sister-City : Kasus Studi Dari Indonesia," dalam Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.7, No.2.

Rusandi. Rio, 2017, "Kerjasama Sister City Jakarta-Berlin Dalam Bidang Kebudayaan Pada Tahun 2011-2014", dalam eJournal Hubungan Internasional, Vol.4, No.4.

Srigustini. Astri, Afriza. Edi Fitriana, 2018, "Dinamika Pengambilan Keputusan

Dalam Kondisi Trade Off Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Peraih Beasiswa Bidikmisi,” dalam Jurnal Promosi, Vol.6, No.1.

Titiyani. Eka, 2014, ”Efektivitas Kerjasama Sister-City Kota Semarang (Indonesia) Dengan Brisbane (Australia) Tahun 2002-2007”, dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI, Vol.1, No.2.

Naskah Publikasi:

Apriliani. Hana, Mukti. Takdir Ali, 2017, Hubungan Kerjasama Kota Kembar (Sister-City) antara Bandung dan Seoul Tahun 2015-2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Putri. Selvinda Novintan, 2017, Kegagalan Kerjasama Sister City Kota Semarang dengan Kota Beihai, Universitas Diponegoro.

Bidang Kerjasama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Yogyakarta Website,” dalam <http://jogjainvest.jogjaprovo.go.id/kerjasama.html> diakses Februari 2022

Desa Lestari Website. (2015). ”Tiga Desa di DIY Resmi Jalin Kerjasama

dengan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation,” dalam <http://desalestari.com/2015/10/05/tiga-desa-di-diy-resmi-jalin-kerjasama-dengan-penabulu-dan-saemaul-globalization-foundation/> diakses Maret 2022

Gyeongsangbuk-Do Website. dalam <https://www.gb.go.kr/eng/page.jsp?largeCode=business&mediumCode=agriculture&smallCode=agriculture&LANGCODE=English> diakses Maret 2022

Gyeongsangbuk-Do Website, dalam <https://www.gb.go.kr/Main/eng> diakses Maret 2022

Acuan dari Dokumen:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbermulyo (RPJMDes) 2013-2018, Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo.

Data Wawancara

Nursanti. Heni (Kepala Divisi Kemakmuran Desa Sumbermulyo). Wawancara, 2019, November..